

Liberalisasi Jasa Telekomunikasi Indonesia, Masuknya FDI, dan Penyerapan Tenaga Kerja Domestik

Muhammad Fawaiq^α

* Email: m.fawaiq@kemendag.go.id

^α Peneliti Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, RI

Riwayat artikel:

- Diterima 06 Juli 2017
- Direvisi 23 Agustus 2017
- Disetujui 8 Desember 2017
- Tersedia online 5 Februari 2018

Kata kunci: FDI, Tenaga Kerja, Sektor Jasa Telekomunikasi, PVECM

JEL Classification : F13, F14, F16, F21, F23

Abstract

The aim of the research is to analyze causality between FDI in telecommunication service sector and the employment in that sector. The methods used are descriptive analysis and linear regression through PVECM estimation. The results showed that the FDI in telecommunication service sector in the period of 2000-2016, only concentrated in Java and Bali with an average contribution of 98 percent per year. The PVECM estimation showed that the foreign direct investment (FDI) has a strong two-way relationship with the employment. This means that FDI significantly encourages labor and labor absorption significantly encourages FDI. The ECT coefficient showed that the change in FDI due to changes in employment to achieve equilibrium is 89 percent and the change of employment due to changes in FDI is by 10 percent per year. Thus, the FDI provides benefits for the employment absorption and the availability of employment is also an important consideration for investors to invest in Indonesia's telecommunications sector.

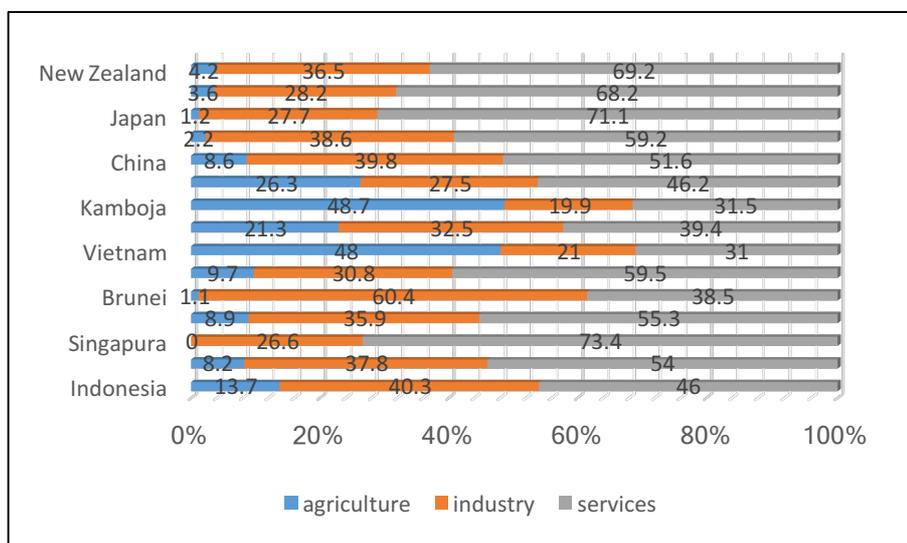
Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kausalitas Granger antara masuknya *foreign direct investment* (FDI) sektor jasa telekomunikasi dengan penyerapan tenaga kerja (TK) di sektor tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan regresi linier melalui estimasi PVECM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya FDI sektor jasa telekomunikasi pada periode 2000-2016, hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali dengan kontribusi rata-rata 98 persen. Hasil estimasi PVECM menunjukkan bahwa masuknya FDI memiliki hubungan Kausalitas Granger jangka panjang dua arah yang kuat dengan penyerapan TK. Hal ini berarti bahwa FDI signifikan mendorong TK dan sebaliknya. Koefisien ECT menunjukkan bahwa perubahan nilai FDI karena perubahan nilai TK untuk mencapai keseimbangan adalah 89 persen per tahun dan perubahan nilai TK karena perubahan nilai FDI sebesar 10 persen per tahun. Dengan demikian, masuknya FDI memberikan manfaat bagi penyerapan TK dan ketersediaan TK juga menjadi pertimbangan penting bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor jasa komunikasi Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari CIA *Factbook* (2016), sektor jasa telah berkontribusi lebih besar dari kontribusi sektor manufaktur dan pertanian pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan negara-negara mitra kerjasama perdagangannya. Berdasarkan data tersebut untuk tahun 2015 sektor jasa berkontribusi sebesar 43,6 persen pada perekonomian Indonesia sementara sektor pertanian sebesar 13,7 persen dan sektor industri sebesar 40,3 persen. Sektor jasa juga lebih besar dari sektor lainnya pada perekonomian negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Thailan. Pada perekonomian Filipina, kontribusi sektor jasa mencapai 55,6 persen sementara sektor pertanian sebesar 26,9 persen dan sektor industri sebesar 17,3 persen. Sektor jasa bahkan sangat dominan pada perekonomian Singapura yang mencapai 73,4 persen kemudian sektor industri sebesar 26,6 persen dan sektor pertanian sebesar 0 persen. Kontribusi sektor jasa pada negara-negara mitra kerjasama Indonesia disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut.

GAMBAR- 1. Kontribusi Sektor Jasa Dibandingkan Sektor Lainnya Pada PDB Tahun 2016



Sumber: CIAFactbook (2016) (diolah).

Selain pada PDB, sektor jasa juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut Findlay dan Pangestu (2016), terjadi peningkatan kontribusi sektor jasa terhadap penyerapan tenaga kerja dari 32 persen pada tahun 1980 menjadi 43 persen pada tahun 2013. Lebih lanjut menurut Findlay dan Pangestu (2016), sektor jasa juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi pengangguran. Adapun peran penting lainnya dari sektor jasa adalah dalam mendorong ekspor Indonesia. Kontribusi sektor jasa dalam ekspor mencapai 20,7 persen (Findlay dan Pangestu, 2016). Peran sektor jasa yang penting inilah yang menjadi pertimbangan penting dalam perundingan liberalisasi perdagangan jasa yang tidak dapat dihindari sebagai suatu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia pada berbagai forum kerjasama perdagangan internasional.

Kerjasama perdagangan internasional di sektor jasa telah dimulai sejak putaran perundingan Uruguay di bawah *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994. Putaran perundingan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan umum bidang perdagangan jasa yang disebut dengan *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Dalam kerjasama perdagangan-perdagangan Indonesia dan negara anggota lainnya, GATS menjadi acuan utama dalam perundingan. Adapun kerjasama-kerjasama perdagangan yang diikuti Indonesia selain meliberalisasi sektor perdagangan barang, juga meliberalisasi sektor perdagangan jasa selain WTO adalah di Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA), *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS), *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA), *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*

(AANZFTA), *ASEAN-Japan Economic Partnership Agreement* (AJEPA), dan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Umumnya posisi tingkat liberalisasi sektor jasa Indonesia pada kerjasama-kerjasama perdagangan khususnya kerjasama regional dan bilateral tersebut lebih tinggi dari posisi liberalisasi sektor jasa Indonesia pada GATS. Berdasarkan data Ishido (2012), Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya memberikan tingkat liberalisasi paling tinggi pada kerjasama AFAS.

Skema AFAS merupakan salah satu hal penting dalam *roadmap* Masyarakat Ekonomi ASEAN 2009-2015. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu pilar cetak biru MEA 2015 yaitu terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal (ASEAN Secretariat, 2009). Hal ini juga berlaku pada sektor perdagangan jasa yang menuntut arus bebas jasa-jasa (ASEAN Secretariat, 2009). Adapun *roadmap* AFAS dalam cetak biru MEA 2015 adalah terkait dengan pembukaan Moda 3 (*commercial presence*) terutama terkait dengan peningkatan batas maksimum kepemilikan modal asing atau *foreign equity participation* (FEP) dan Moda 4 (tenaga kerja di sektor jasa). Menurut Ishido (2012), negosiasi liberalisasi jasa di AFAS masih berfokus pada moda 3 dan moda 4 sedang moda 1 dan moda 2 umumnya telah diliberalisasi secara penuh.

Roadmap AFAS dalam MEA 2015 ini dituangkan dalam rencana aksi liberalisasi yang mendorong arus bebas penyedia jasa dari satu negara ASEAN ke negara lainnya lainnya melalui peningkatan FEP. Hal tersebut dituangkan dalam rencana aksi yang dimulai dari periode 2008-2009 sampai periode 2014-2015. Berdasarkan rencana aksi tersebut, setiap negara ASEAN memberikan FEP sekurang-kurangnya sebesar 51 persen pada empat sektor jasa utama dan 49 persen di sektor jasa logistik serta sektor jasa lainnya. Untuk periode 2010-2011, FEP ditingkatkan menjadi 70 persen pada empat sektor jasa prioritas, 51 persen untuk sektor jasa logistik serta sektor jasa lainnya. Pada periode 2012-2013, FEP sektor jasa logistik ditingkatkan menjadi 70 persen dan selanjutnya pada periode 2014-2015, seluruh persyaratan FEP pada Moda 3 harus sudah menjadi maksimum 70 persen.

Roadmap sektor jasa dalam cetak biru MEA 2015 terkait dengan liberalisasi tenaga kerja sektor jasa (moda 4) untuk periode 2008-2009 adalah menyelesaikan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) pada beberapa profesi seperti jasa arsitek, jasa akuntan, jasa survei kualifikasi, jasa praktik medis, dan jasa praktik dokter gigi. Selanjutnya pada tahun 2012 MRA ini akan dikembangkan ke jasa profesi lainnya dan pada tahun 2015 MRA yang telah lengkap dapat diberlakukan. Untuk kasus Moda 4 ini, *roadmap* AFAS lebih fokus pada MRA sementara keterbukaan pasar masih belum mencapai kesepakatan yang berarti. Hal ini diungkapkan oleh Ishido (2012) bahwa liberalisasi tenaga kerja sektor jasa pada kerjasama AFAS dan kerjasama ASEAN+1 masih sangat rendah.

Sampai tahun 2017, Indonesia belum mengikuti *roadmap* AFAS yang seharusnya dipenuhi pada tahun 2015 terutama pada sektor jasa telekomunikasi. Saat ini, pada AFAS Paket 8, Indonesia masih memberikan FEP rata-rata maksimum 49 persen sedangkan tuntutan liberalisasinya mencapai 70 persen. Permasalahan lainnya adalah setiap negara-negara ASEAN masih sangat restriktif dalam membuka Moda 4. Dengan kata lain tenaga kerja sektor jasa telekomunikasi Indonesia memiliki peluang yang relatif kecil untuk dapat bekerja di negara lain. Salah satu upaya untuk mendorong penciptaan tenaga kerja disektor jasa telekomunikasi adalah meningkatkan investasi. Investasi saat ini ditujukan pada investasi padat karya dan yang mendorong ekspor. Untuk itu penelitian ini akan melakukan studi kasus pada sektor jasa telekomunikasi untuk melihat pengaruh masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab tantangan liberalisasi sektor jasa di AFAS terutama setelah paket 8.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Liberalisasi Sektor Jasa

Berdasarkan GATS, perdagangan internasional di sektor jasa dibagi menjadi empat moda yang disebut *mode of supply* (WTO, 2001). Keempat moda tersebut yaitu Mode 1 (*Cross Border Supply*), Mode 2 (*Consumption Abroad*), Mode 3 (*Commercial Presence*), dan Mode 4 (*Movement*

of *Natural Person*) (WTO, 2001). Lebih lanjut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 mendefinisikan setiap Moda dalam perdagangan jasa adalah sebagai berikut Moda 1 “pasokan lintas batas (*cross border supply*)” adalah penyediaan Jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lain, seperti pembelian secara *online* (dalam jaringan) atau *call center*; Moda 2 adalah penyediaan Jasa di dalam wilayah suatu negara untuk melayani konsumen dari negara lain; Moda 3 adalah penyediaan Jasa penyedia jasa dari suatu negara melalui keberadaan komersial di dalam wilayah negara lain, seperti penyedia jasa telekomunikasi asing misalnya Ooredoo dan XL yang menanamkan modalnya dalam bentuk *Foreign Equity Participation*) dan mengakuisisi ataupun melakukan *joint venture* dengan penyedia jasa domestik Indonesia; dan Moda 4 adalah penyediaan Jasa oleh perseorangan warga negara yang masuk ke wilayah negara lain untuk sementara waktu. Contoh Moda 4 di Indonesia adalah direktur operasi dan direktur keuangan PT. Indosat Ooredoo yang dijabat oleh non WNI.

Selain Moda perdagangan internasional di sektor jasa, GATS juga mengatur sektor-sektor jasa yang diperjanjikan. Sektor-sektor jasa yang diperjanjikan dalam GATS terdiri dari 12 sektor yaitu (1) *Business services*, (2) *Communication services*, (3) *Construction services*, (4) *Distribution services*, (5) *Educational services*, (6) *Environmental services*, (7) *Financial services*, (8) *Health-related and social services*, (9) *Tourism and travel – related services*, (10) *Recreational, cultural and supporting services*, (11) *Transport services*, dan (12) *Other services not elsewhere included*. Penelitian ini dibatasi pada sektor komunikasi terutama subsektor jasa komunikasi. Adapun Moda yang sedang fokus untuk dinegosiasi saat ini adalah Moda 3 terutama terkait dengan peningkatan batas maksimum kepemilikan modal asing.

Sektor jasa telekomunikasi di WTO merupakan salah satu subsektor dari sektor jasa komunikasi. Indonesia telah meliberalisasi sektor ini sejak perundingan WTO tahun 1994. Berdasarkan SOC Indonesia di WTO 1994, Indonesia memberikan komitmen terbuka tanpa pembatasan atau liberalisasi penuh pada Moda 1 dan Moda 2 sektor jasa ini. Untuk Moda 3, Indonesia hanya mengizinkan lima penyedia jasa telekomunikasi asing ditambah dengan penyedia jasa yang telah ada sebelumnya. Adapun informasi lain dari SOC Indonesia pada WTO (1994) ini adalah untuk Moda 4, Indonesia menutup moda ini dan hanya mengizinkan direktur dan tenaga kerja ahli asing. Untuk Moda 3, SOC Indonesia di WTO belum membahas mengenai batas maksimum kepemilikan modal asing.

Perundingan liberalisasi sektor jasa telekomunikasi kemudian dilanjutkan oleh Indonesia di ASEAN (AFAS) dan ASEAN+1. Menurut Ishido (2012), negara-negara anggota ASEAN memberikan liberalisasi tertinggi sektor jasanya pada kerjasama internal ASEAN yang disebut dengan AFAS. Paket AFAS yang sudah ditandatangani dan diratifikasi Indonesia saat ini adalah paket AFAS ke delapan. Liberalisasi sektor jasa di dalam paket AFAS ini dibuat dalam suatu paket. Setiap paket ini harus terdapat peningkatan. Untuk sektor jasa komunikasi, Indonesia belum dapat memenuhi target liberalisasi 70 persen.

Hubungan antara FDI dan TK

Shah dan Khan (2016) meneliti mengenai hubungan liberalisasi perdagangan dan masuknya FDI di pasar negara-negara berkembang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah regresi data panel dengan model *random effect*. Penelitian Shah dan Khan (2016) menemukan bahwa liberalisasi perdagangan yang mendorong penurunan tarif serta hambatan liberalisasi secara signifikan mendorong masuknya FDI di negara-negara berkembang. Penelitian Shah dan Khan (2016) ini juga merujuk beberapa penelia seperti penelitian Addison and Heshmati (2003), Jaumotte (2004) dan Aizenman and Ilan (2006). Penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa liberalisasi perdagangan secara positif mempengaruhi masuknya FDI.

Bekhet dan Mugableh (2016) membangun model ekonometrika hubungan antara kedua variabel ini (FDI dan TK) menggunakan *dynamic causality directions*. Lebih lanjut Bekhet dan Mugableh menemukan bahwa terdapat hubungan satu arah dimana FDI mendorong TK sektor jasa manufaktur dan TK mendorong FDI di sektor jasa konstruksi Malaysia. Khumalo dan Mosiane

(2014) membangun model *Vector Error Correction Model* (VECM) untuk hubungan FDI dan TK dan menemukan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara FDI dan TK dimana apabila terjadi peningkatan satu persen tenaga kerja akan menyebabkan peningkatan lima persen FDI. Said dan Jamoussi (2015) meneliti hubungan antara FDI dan TK pada sektor jasa telekomunikasi menggunakan panel *Spatial Durbin Model* (SDM) dan menemukan bahwa FDI berdampak langsung dan positif terhadap tenaga kerja. Gyasi dan Li (2015) meneliti hubungan kedua variabel pada sektor jasa konstruksi di Ghana menggunakan *regresi linier* dan menemukan bahwa masuknya FDI berdampak positif dan signifikan pada pertumbuhan tenaga kerja di negara tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi dengan *Panel Vector Error Correction Model* (PVECM). Analisis VECM mempertimbangkan adanya fluktuasi data yang bergerak disekitar *tren* jangka panjang sehingga model VECM digunakan untuk menganalisis adanya koreksi pada variabel terikat akibat adanya kondisi ketidakseimbangan pada beberapa variabel (Ekananda, 2016). Lebih lanjut Ekananda menyatakan bahwa model VECM ini sangat erat kaitannya dengan metode uji kointegrasi sehingga sebelum estimasi VECM dilakukan, kedua variabel (FDI dan TK) telah lulus uji kointegrasi atau data memiliki hubungan jangka panjang. Uji kointegrasi ini merupakan salah satu tahapan sebelum estimasi model VECM yang dilakukan setelah uji stasioner. Adapun tahapan-tahapan dalam estimasi model PVECM adalah sebagai berikut.

Tahap 1: Uji stasioneritas

Konsep pengujian stasioneritas dalam model PVECM yang menggunakan data panel ini menggunakan konsep pengujian stasioneritas data *time series*. Ekananda (2016) menyatakan bahwa data yang stasioner menunjukkan varians data yang tetap sepanjang waktu observasi, sedangkan data yang tidak stasioner menjelaskan bahwa pada saat tertentu situasi ekonomi melakukan suatu tindakan tertentu yang keluar dari biasanya. Oleh karena penelitian ini menggunakan data panel maka pengujian stasioneritas menggunakan Im, Pesaran dan Shin (IPS) *unit root test*. Hal ini juga digunakan pada penelitian Samimi, Sadeghi dan Sadeghi (2013) yang juga menggunakan model PVECM untuk menguji hubungan FDI pada hotel dan restoran terhadap kedatangan wisatawan mancanegara. Pengujian pertama dilakukan pada *level*, apabila H_0 diterima maka pengujian akan dilanjutkan pada *first differencing*. Pengujian tersebut dilakukan pada masing-masing variabel sampai ditemukan ordo yang sama pada keduanya dengan asumsi bahwa kedua variabel (Moda 3 dan Moda 4) terintegrasi pada ordo yang sama.

Tahap 2: Uji Kointegrasi

Pengujian kointegrasi untuk data panel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang diusulkan oleh Pedroni (1999). Pengujian dengan metode Pedroni digunakan dalam uji kointegrasi data panel yang bertujuan untuk menguji hubungan jangka panjang antar variabel (Khumalo dan Mosiane, 2014). Hipotesis yang diuji dalam pengujian kointegrasi ini adalah:

H_0 : tidak terdapat hubungan kointegrasi antar variabel;

H_1 : Terdapat hubungan kointegrasi antar variabel.

Tahap 3: Estimasi PVECM

Adapun model VECM untuk menguji hubungan antara masuk penyedia jasa asing dengan tenaga kerja disajikan pada persamaan (1) dan Persamaan (2) sebagai berikut.

$$\Delta FDI_{it} = \alpha_{1i} + \varphi_{1i} ECT_{i,t-1} + \sum_{j=1}^k \gamma_{1ji} \Delta FDI_{i,t-k} + \sum_{j=1}^k \theta_{1ji} \Delta TK_{t-k} + \varepsilon_{1it} \dots (1)$$

$$\Delta TK_{it} = \alpha_{2i} + \varphi_{2i} ECT_{i,t-1} + \sum_{j=1}^k \gamma_{2ji} \Delta FDI_{i,t-k} + \sum_{j=2}^k \theta_{2ji} \Delta TK_{t-k} + \varepsilon_{2it} \dots (2)$$

Dimana i menggambarkan provinsi, t (periode), dan k adalah *lag* optimum. Adapun Δ adalah perbedaan operator, ECT adalah *lagged error-correction term* yang diperoleh dari hubungan kointegrasi jangka panjang. ECT adalah residual yang diperoleh dari hubungan kointegrasi jangka panjang. Adapun φ_1 dan φ_2 adalah koefisien ECT untuk hubungan kausalitas jangka panjang serta $\varepsilon_{1,it}$ dan $\varepsilon_{2,it}$ adalah istilah gangguan yang diasumsikan tidak berkorelasi. Koefisien ECT (φ_1 dan φ_2) juga berguna untuk mengetahui kecepatan perubahan suatu variabel karena perubahan variabel lainnya untuk mencapai keseimbangan.

Tahap 4: Uji Kausalitas Granger

Pengujian kausalitas Granger menggunakan Panel VECM Granger. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hubungan kausalitas jangka panjang, jangka pendek dan gabungan antara keduanya. Pengujian kausalitas jangka pendek menggunakan *F-statistik* dari hasil *Wald Test* pada koefisien Θ_1 atau koefisien γ_2 . Hipotesis yang dikembangkan untuk hubungan kausalitas jangka pendek yaitu:

$H_0 : \Theta_1 = 0$ pada persamaan (1) yang berarti TK tidak mempengaruhi FDI dalam jangka pendek atau $\gamma_2 = 0$ pada persamaan (2) yang berarti FDI tidak mempengaruhi TK dalam jangka pendek.

$H_1 : \Theta_1 \neq 0$ pada persamaan (1) yang berarti TK mempengaruhi FDI dalam jangka pendek atau $\gamma_2 \neq 0$ pada persamaan (2) yang berarti FDI mempengaruhi TK dalam jangka pendek.

Selanjutnya adalah pengujian hipotesis untuk hubungan jangka panjang. Hipotesis yang akan diuji yaitu:

$H_0 : \varphi_1 = 0$ pada persamaan (1) yang berarti TK tidak mempengaruhi FDI dalam jangka panjang atau $\varphi_2 = 0$ pada persamaan (2) yang berarti FDI tidak mempengaruhi TK dalam jangka panjang.

$H_1 : \varphi_1 \neq 0$ pada persamaan (1) yang berarti TK mempengaruhi FDI dalam jangka panjang atau $\varphi_2 \neq 0$ pada persamaan (2) yang berarti FDI mempengaruhi TK dalam jangka panjang.

Untuk menguji kekuatan hubungan antar variabel maka dilakukan pengujian hubungan kausalitas gabungan antara jangka pendek dan jangka panjang. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut.

$H_0 : \varphi_1 = \Theta_1 = 0$ pada persamaan (1) yang berarti pengaruh TK pada FDI kuat atau $\varphi_2 = \gamma_2 = 0$ pada persamaan (2) yang berarti FDI tidak mempengaruhi TK dalam jangka panjang.

$H_1 : \varphi_2 = \Theta_1 \neq 0$ pada persamaan (1) yang berarti pengaruh TK pada FDI tidak kuat atau $\varphi_2 = \gamma_2 \neq 0$ pada persamaan (2) yang berarti pengaruh FDI pada TK tidak kuat.

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data realisasi FDI dan data pekerja Indonesia di sektor jasa komunikasi. Data masuknya Moda 3 melalui FDI dan Tenaga Kerja tersebut merupakan data Panel dengan *cross section* sebanyak tujuh provinsi (Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Provinsi Bali) dan *time series* selama 17 tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2016. Total pengamatan dari data panel dalam penelitian ini adalah sebanyak 119 pengamatan. Berdasarkan sumber, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait sebagai berikut: data jumlah tenaga kerja di sektor jasa komunikasi diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan data realisasi penanaman modal asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) untuk sektor jasa telekomunikasi juga diperoleh dari BKPM. Menurut OECD (2013), FDI didefinisikan sebagai investasi lintas batas oleh entitas yang tinggal dalam satu ekonomi dengan tujuan memperoleh pengembalian abadi pada perusahaan yang berada di ekonomi lain. Adapun tenaga kerja pada penelitian ini adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor jasa telekomunikasi.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Liberalisasi Sektor Jasa Telekomunikasi

Dalam liberalisasi sektor jasa telekomunikasi di AFAS Paket 8, Indonesia masih sangat restriktif terutama pada subsektor-subsektor telekomunikasi penting. Sektor-sektor tersebut seperti jasa telekomunikasi bergerak (*mobile telephone*) dan paket datanya masih diberikan FEP 0 sedangkan negara ASEAN lainnya telah membuka memberikan FEP pada subsektor jasa *mobile telephone* dengan FEP tertinggi diberikan Malaysia yaitu 70 persen kemudian Vietnam memberikan FEP sebesar 65 persen.

TABEL-1. Keterbukaan FEP Jasa Telekomunikasi di AFAS Paket 8

dalam persen terhadap total modal

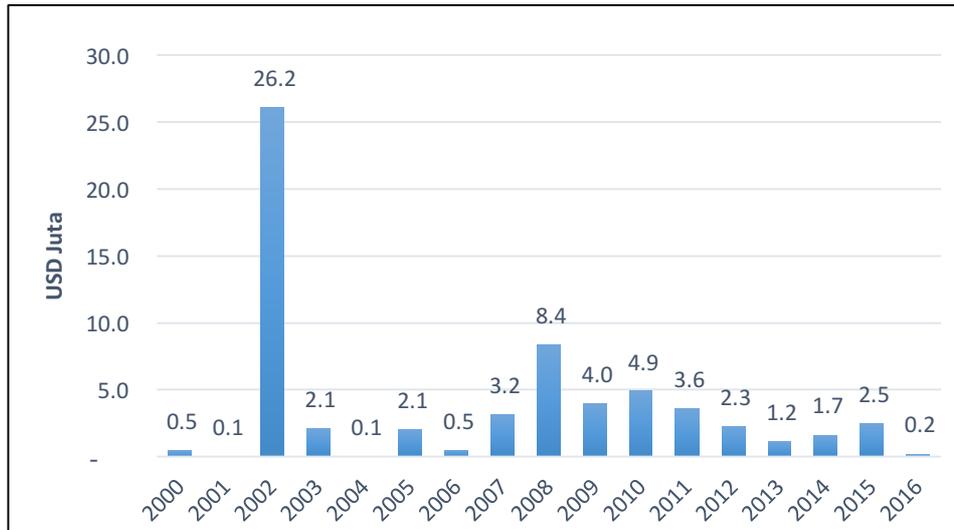
Subsektor	Indonesia	Malaysia	Thailand	Filipina	Vietnam
<i>Voice Telephone</i>	49	70	49	40	65
<i>Packet-switched data transmission</i>	49	70	0	40	65
<i>Private leased circuit</i>	49	70	0	40	65
<i>On-line information and database retrieval</i>	51	70	25	0	65
<i>On-line information and or data processing</i>	49		25	40	65
<i>Data network</i>	0		25	40	0
<i>Electronic message and information</i>	0		0	40	0
<i>Local services</i>	49		0	0	65
<i>Long Distance and International</i>	49		0	0	65
<i>Internet Access</i>	49	70	0	0	65
<i>Domestic/International satellite</i>	0	70	0	0	0
<i>Satellite earth station</i>	0	70	0	0	0
<i>International switching and other international gateway</i>	0	70	0	0	0
<i>Mobile services analogue/digital cellular</i>	0	70	0	0	0
<i>Trunked radio</i>	0	70	0	0	0
<i>Video transport</i>	0	70	0	0	0
<i>Mobile telephone</i>	0	70	49	40	65
<i>Mobile data</i>	0	70	0	0	65
<i>Interconnection</i>	0	70	0	0	0
<i>Integrated telecommunication</i>	0	70	0	0	0
<i>Telecommunications terminal equipment leasing</i>	0		49	0	0
<i>Domestic VSAT</i>	0		40	0	0
<i>Telecommunications equipment sales</i>	0		49	0	0
<i>Telecommunication Consulting</i>	0		70	0	0

Sumber: ASEAN Sekretariat (2014) diolah

Realisasi *Foreign Direct Investment* (FDI) di sektor jasa telekomunikasi Indonesia.

Realisasi FDI sektor jasa telekomunikasi di Indonesia dalam 17 tahun terakhir (2000-2016) berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan rata-rata (*geometric growth*) menunjukkan tren positif sebesar 4,6 persen. Nilai realisasi FDI tersebut berfluktuasi setiap tahunnya. Nilai realisasi FDI sektor jasa telekomunikasi Indonesia tertinggi yang tercatat adalah pada tahun 2002 yang sebesar USD 26,2 juta. Hal ini disebabkan oleh masuknya investasi asing dalam bentuk FDI dari perusahaan asal Singapura yaitu *Singapore Telecommunication* (Singtel) yang membeli saham Indosat pada tahun tersebut. Nilai FDI ini kembali stabil menjadi USD 2,1 juta pada tahun 2003. Pada tahun 2008, realisasi FDI sektor jasa telekomunikasi kembali naik menjadi USD 8,4 juta pada tahun 2008. Adapun realisasi FDI di sektor jasa telekomunikasi Indonesia secara lengkap disajikan pada Gambar 2 sebagai berikut.

GAMBAR-2. Realisasi FDI Sektor Jasa Telekomunikasi Indonesia.



Sumber: BKPM (2017a) diolah

Jika dilihat lebih rinci, realisasi FDI sektor jasa telekomunikasi Indonesia berasal dari 7 Provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali terutama di Provinsi DKI Jakarta. Adapun kontribusi Provinsi DKI Jakarta mencapai 100 persen dari total realisasi FDI nasional pada beberapa tahun seperti tahun 2004, 2006, 2009, 2011, 2012, dan tahun 2013. Adapun kontribusi enam provinsi lainnya (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali) mencapai 100 persen pada tahun 2001, sebesar 97 persen pada tahun 2002, dan 51 persen pada tahun 2015. Provinsi Indonesia lainnya (selain tujuh provinsi) hanya mendapat realisasi FDI di jasa telekomunikasi pada beberapa tahun yaitu tahun 2001 (1 persen), 2003 (12 persen), 2007 (3 persen), 2011 (1 persen), 2015 (19 persen) dan 2016 (1%). Adapun rata-rata realisasi FDI sektor jasa telekomunikasi di Provinsi Indonesia lainnya adalah dua persen. Kontribusi realisasi FDI di jasa telekomunikasi disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

TABEL-2. Realisasi FDI di Jasa Telekomunikasi Indonesia.

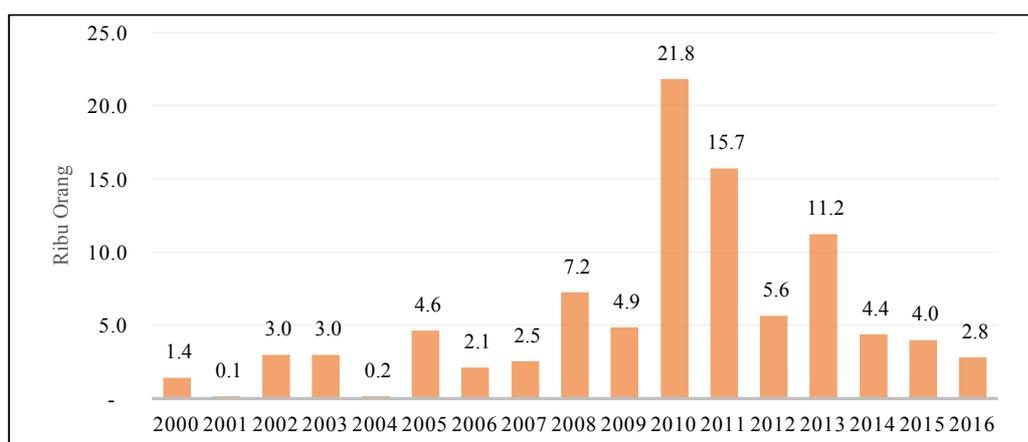
Tahun	Kontribusi terhadap total nasional dalam Persen		
	Enam Provinsi	DKI Jakarta	Prov. Indonesia lainnya
2000	5	95	0
2001	100	0	0
2002	97	2	1
2003	0	88	12
2004	0	100	0
2005	4	96	0
2006	0	100	0
2007	1	96	3
2008	1	99	0
2009	0	100	0
2010	0	99	1
2011	0	100	0
2012	0	100	0
2013	0	100	0
2014	1	99	0
2015	51	30	19
2016	35	63	1

Sumber: BKPM (2017a) diolah

Tenaga Kerja Sektor Jasa Telekomunikasi Indonesia

Selain realisasi FDI yang mengalami tren positif pada periode 2000-2016, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai karyawan atau pekerja tetap di penyedia jasa telekomunikasi asing yang melakukan FDI di Indonesia juga mengalami tren positif sebesar 16,23 persen. Walaupun demikian, jumlah tenaga kerja dalam periode tersebut juga mengalami fluktuasi. Adapun jumlah tenaga kerja tertinggi yang terserap pada sektor ini terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah 21.815 orang. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 28 persen menjadi 15.700 pada tahun 2011. Rata-rata penyerapan tenaga kerja Indonesia khususnya yang bekerja pada perusahaan-perusahaan jasa telekomunikasi asing ini adalah 5.600 orang per tahun. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap oleh masuknya FDI di sektor jasa telekomunikasi disajikan pada Gambar 3 sebagai berikut.

GAMBAR-3. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Jasa Telekomunikasi Indonesia.



Sumber: BKPM (2017b) diolah

Berdasarkan lokasi, tujuh provinsi yang diamati seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Provinsi Bali telah mewakili lebih dari 90 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor jasa telekomunikasi nasional yang bekerja pada penyedia jasa asing pada beberapa tahun seperti tahun 2002, 2003, 2007, 2013 dan 2014 serta mencapai 100 persen dari total penyerapan tenaga kerja oleh adanya FDI di sektor jasa telekomunikasi Indonesia pada beberapa tahun lainnya dalam periode tersebut. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi rata-rata mencapai 85 persen dari total nasional tersebut. Kontribusi penyerapan tenaga kerja oleh penyedia jasa telekomunikasi asing terhadap total nasional tersebut disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut.

TABEL-3. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia di Jasa Telekomunikasi Indonesia.

Tahun	Kontribusi terhadap total nasional dalam Persen		
	Enam Provinsi	DKI Jakarta	Prov. Indonesia lainnya
2000	42	58	0
2001	81	19	0
2002	10	88	2
2003	0	98	2
2004	0	100	0
2005	6	94	0
2006	0	100	0
2007	30	65	5
2008	2	98	0
2009	2	98	0
2010	1	99	0
2011	0	100	0

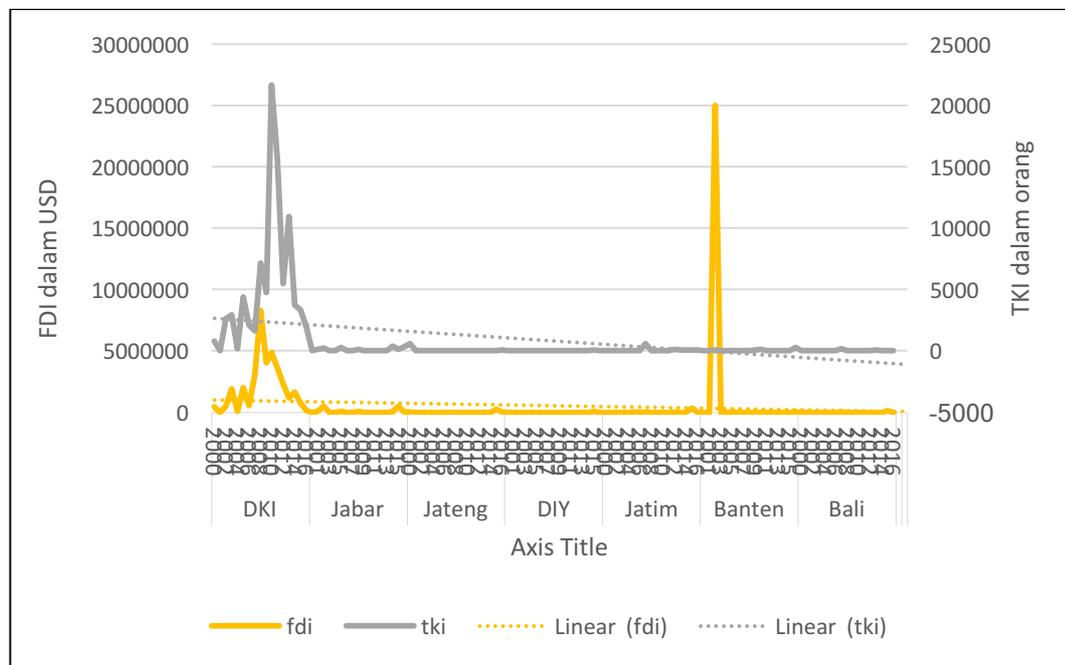
Tahun	Kontribusi terhadap total nasional dalam Persen		
	Enam Provinsi	DKI Jakarta	Prov. Indonesia lainnya
2012	3	97	0
2013	1	97	1
2014	11	85	4
2015	9	83	8
2016	27	69	3

Sumber: BKPM (2017b) diolah

Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa masuknya FDI akan mendorong penciptaan tenaga kerja. Hal ini juga terjadi pada sektor jasa telekomunikasi. Masuknya FDI di sektor jasa komunikasi seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 4 diikuti oleh penyerapan tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian terlihat secara deskriptif bahwa FDI mendorong penciptaan tenaga kerja. Namun demikian, perlu dilakukan analisa statistik secara mendalam untuk melihat hubungan kedua variabel secara mendalam dengan analisis PVECM.

GAMBAR-4. FDI dan TK di Sektor Jasa Telekomunikasi Indonesia

Estimasi Hubungan Kausalitas FDI dan TK dengan *Panel Vector Error Correction Model (PVECM)*



Tahapan-tahapan penting yang harus dilakukan sebelum data diestimasi menggunakan PVECM adalah pengujian *unit root* atau stasioneritas dan uji kointegrasi untuk hubungan jangka panjang. Pengujian stasioneritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya *unit root* dan juga untuk mengetahui ordo hubungan antar variabel. Pengujian stasioneritas pertama dilakukan pada ordo *level*. Adapun hasil uji stasioneritas pada ordo *level* disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut.

TABEL-4. Hasil Pengujian *Unit Root* dengan IPS pada Tingkat *Level*

Metode	Variabel FDI		Variabel TK	
	Statistic	Prob	Statistic	Prob
Im, Pesaran and Shin (IPS) W-stat	0.56072	0.7125	2.02598	0.9786
ADF - Fisher Chi-square	12.4828	0.5676	17.4247	0.1343
PP - Fisher Chi-square	59.6477	0.0000	296.317	0.0000

sumber: data diolah

Hasil pengujian stasioneritas pada ordo *level* dengan metode IPS dan ADF menunjukkan bahwa nilai probabilitas statistik kedua variabel masih lebih besar dari taraf 5 persen. Dengan kata lain, kedua variabel masih mengandung *unit root* atau belum stasioner. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian stasioneritas selanjutnya yaitu pada ordo *first difference*. Adapun hasil pengujian stasioneritas pada *first difference* disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut.

TABEL-5. Hasil Pengujian *Unit Root* dengan IPS pada Tingkat *First Difference*

Metode	Variabel FDI		Variabel TK	
	Statistic	Prob	Statistic	Prob
Im, Pesaran and Shin (IPS) W-stat	-3.77578	0.0001	-2.29489	0.0109
ADF - Fisher Chi-square	47.4197	0.0000	41.3128	0.0000
PP - Fisher Chi-square	149.649	0.0000	112.989	0.0000

Sumber: data diolah

Tabel 5. menunjukkan bahwa nilai probabilitas statistik untuk semua metode pengujian (IPS dan ADF) pada ordo *first difference* telah lebih kecil dari taraf 5 persen. Dengan demikian, kedua variabel sudah tidak mengandung *unit root* atau telah stasioner. Untuk itu, kedua variabel telah memiliki ordo yang sama yaitu *first difference* atau kedua variabel stasioner pada turunan pertama. Selanjutnya ordo ini digunakan pada estimasi model PVECM. Setelah diketahui ordo dari kedua variabel, selanjutnya dilakukan pengujian kointegrasi untuk menguji ada tidaknya hubungan jangka panjang antara kedua variabel. Selain itu, pengujian kointegrasi akan menentukan apakah data diestimasi menggunakan *panel Vector autoregression* (PVAR) atau PVECM. Adapun hasil pengujian kointegrasi disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut.

TABEL-6. Hasil Pengujian Hubungan Kointegrasi dengan Pedroni

Test Statistics	Statistic	Prob
<i>Panel v-Statistic</i>	-2.010750	0.9778
<i>Panel rho-Statistic</i>	-2.277538	0.0114
<i>Panel PP-Statistic</i>	-2.933237	0.0017
<i>Panel ADF-Statistic</i>	-2.864417	0.0021
<i>Group rho-Statistic</i>	-2.280242	0.0113
<i>Group PP-Statistic</i>	-6.069550	0.0000
<i>Group ADF-Statistic</i>	-0.852832	0.1969

Sumber: data diolah

Hasil pengujian kointegrasi pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai probabilitas statistik pada setiap pengujian kointegrasi (kecuali *Panel v-Statistic* dan group ADF) telah lebih kecil dari taraf 5 persen. Dengan demikian, keputusannya adalah menolak Hipotesis H_0 atau kedua variabel memiliki hubungan kointegrasi (hubungan jangka panjang). Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Habib dan Sarwar (2013) yang menemukan bahwa terdapat hubungan kointegrasi atau hubungan jangka panjang antara FDI dengan Tenaga Kerja. Hal ini juga mengindikasikan bahwa estimasi data dapat dilakukan dengan PVECM. Adanya hubungan jangka panjang ini menunjukkan bahwa hasil pengujian telah sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena hubungan jangka panjang yang diperoleh dari hasil pengujian ini belum menunjukkan arah hubungan seperti hubungan satu arah atau hubungan dua arah. Untuk itu perlu dilakukan pengujian Kausalitas Granger pada koefisien jangka pendek dan koefisien jangka panjang (koefisien ECT) pada hasil estimasi model PVECM dengan tujuan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Adapun hasil estimasi PVECM adalah sebagai berikut.

$$D(\text{FDI}) = (-0,890445) * (\text{FDI}(-1) - 291,839719777 * \text{TK}(-1) - 365098,279755) + (-0,045622) * D(\text{FDI}(-1)) + (-0,004397) * D(\text{FDI}(-2)) + (-83,56825) * D(\text{TK}(-1)) + (34,56358) * D(\text{TK}(-2)) + (-257871,4) \dots 3$$

$$D(\text{TK}) = -0,100711 * (\text{TK}(-1) - 0,00342653837787 * \text{FDI}(-1) + 1251,02326727) + -0,400336 * D(\text{TK}(-1)) + -0,211109 * D(\text{TK}(-2)) + -0,000240 * D(\text{FDI}(-1)) + 5,97E05 * D(\text{FDI}(2)) + 23,84326 \dots 4$$

Dari hasil estimasi PVECM pada persamaan 3 dan 4, kemudian dilakukan pengujian Kausalitas Granger jangka pendek dengan uji Wald pada masing-masing koefisien. Adapun koefisien yang diuji adalah $\Theta_1 = 0$ untuk hubungan Kausalitas Granger jangka pendek untuk variabel terikat FDI dan Θ_1 untuk variabel terikat TK. Adapun hasil pengujian Kausalitas Granger jangka pendek dengan uji Wald disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut.

TABEL-7. Diagnosa Koefisien Θ_1 dan Koefisien γ_2 dengan Uji untuk Hubungan Kausalitas Granger Jangka Pendek Pada Lag 1

Test Statistic	Varibel terikat FDI dan Koefisien Θ_1		Varibel terikat TK dan Koefisien γ_2	
	Value	Probability	Value	Probability
t-statistic	-1.821287	0.0718	-1.958224	0.0532
F-statistic	3.317087	0.0718	3.834642	0.0532
Chi-square	3.317087	0.0686	3.834642	0.0502

Sumber: data diolah

Hasil pengujian pada hubungan Kausalitas Jangka Pendek untuk variabel terikat FDI menunjukkan bahwa probabilitas statistik lebih tinggi dari taraf 5 persen untuk semua parameter pengujian. Hal ini berarti bahwa hipotesis nol yang menyatakan bahwa masuknya FDI di jasa komunikasi tidak dipengaruhi oleh ketersediaan TK Indonesia di sektor tersebut dalam jangka pendek diterima pada taraf 5 persen. Hal yang sama juga ditunjukkan pada hasil pengujian kausalitas jangka pendek dengan variabel terikat TK dimana masuknya FDI tidak signifikan mendorong penyerapan TK di sektor jasa telekomunikasi Indonesia dalam jangka pendek. Dengan demikian diketahui bahwa kedua variabel (FDI dan TK di sektor jasa telekomunikasi) tidak memiliki hubungan Kausalitas Granger jangka pendek pada taraf 5 persen. Namun demikian apabila pengujian diperlebar lagi pada taraf 10 persen maka hipotesis nol ditolak atau terdapat hubungan dua arah antara FDI dan TK dalam jangka pendek pada taraf 10 persen. Selanjutnya, dilakukan pengujian Kausalitas Granger Jangka Panjang dengan hasil ditunjukkan pada Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8. Diagnosa Koefisien ECT dengan Uji Wald untuk Hubungan Kausalitas Granger Jangka Panjang Pada Lag 1.

Test Statistic	Varibel bebas FDI dan Koefisien ϕ_1		Varibel bebas TK dan Koefisien Φ_2	
	Value	Probability	Value	Probability
t-statistic	-12.91217	0.0000	-2.312711	0.0230
F-statistic	166.7242	0.0000	5.348633	0.0230
Chi-square	166.7242	0.0000	5.348633	0.0207

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 8, hasil pengujian Wald pada koefisien variabel ECT (ϕ_1) menunjukkan bahwa nilai probabilitas statistiknya lebih kecil dari taraf 5 persen. Dengan demikian keputusan uji hipotesis adalah menolak hipotesis nol (H_0) atau masuknya FDI secara signifikan didorong oleh

ketersediaan TK sektor jasa komunikasi di Indonesia. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh nilai probabilitas statistik pada variabel terikat TK yang lebih kecil dari taraf 5 persen. Hal ini juga berarti menolak hipotesis nol (H_0) atau masuknya FDI disektor jasa telekomunikasi secara signifikan menyerap tenaga kerja di sektor ini. Pengujian jangka hubungan Kausalitas Granger jangka panjang ini membuktikan bahwa FDI dan TK pada sektor jasa telekomunikasi memiliki hubungan Kausalitas Granger dua arah.

Adapun nilai koefisien *Error Correction Term* (ECT) pada pengujian Kausalitas Granger jangka panjang ini sebesar 0,89 untuk variabel terikat FDI dan 0,1 untuk variabel bebas TK. Hal ini berarti bawa kecepatan perubahan FDI akibat perubahan TK untuk mencapai keseimbangan jangka panjang adalah 89 persen per tahun. Sebaliknya, kecepatan perubahan TK akibat perubahan FDI untuk mencapai keseimbangan jangka panjang sebesar 10 persen pertahun. Untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel, maka dilakukan pengujian Kausalitas Granger gabungan antara jangka panjang dan jangka pendek dengan hasil disajikan pada Tabel 9 sebagai berikut.

TABEL-9. Diagnosa Koefisien $\theta_1 = \phi_1 = 0$ dan dengan Uji Wald untuk Kekuatan Kausalitas FDI terhadap TK dan $\gamma_2 = \phi_2 = 0$ untuk Kekuatan Kausalitas TK terhadap FDI Hubungan Kausalitas Granger Jangka Panjang Pada Lag 1.

Test Statistic	$\theta_1 = \phi_1 = 0$ / FDI		$\gamma_2 = \phi_2 = 0$ / TK	
	Value	Probability	Value	Probability
F-statistic	83.43323	0.0000	-0.100711	0.043547
Chi-square	166.8665	0.0000	-0.000240	0.000123

Sumber: data diolah

Pada pengujian Kausalitas Granger dari hasil estimasi PVECM sebelumnya telah diketahui bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas jangka pendek pada taraf 5 persen tetapi terdapat hubungan Kausalitas Granger jangka panjang antar variabel dua arah. Hubungan Kausalitas Granger jangka panjang dua arah ini diperkuat oleh hasil pengujian gabungan antara jangka pendek dan jangka panjang dimana nilai probabilitas lebih untuk kedua variabel lebih kecil dari taraf 5 persen.

Nilai koefisien ECT untuk pengaruh ketersediaan tenaga kerja terhadap masuknya FDI (FDI \rightarrow TK) lebih besar dari nilai koefisien ECT untuk pengaruh FDI terhadap Tenaga Kerja (FDI \leftarrow TK). Hal ini berarti bahwa peran ketersediaan sumber daya manusia Indonesia di sektor jasa telekomunikasi dalam mendorong masuknya FDI lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh masuknya FDI terhadap tenaga kerja. Faktor tenaga kerja ini menjadi pertimbangan penting bagi para investor karena masih restriktifnya Indonesia di Moda 4 (tenaga kerja) sektor jasa telekomunikasi atau Indonesia masih membatasi masuknya tenaga kerja asing di sektor ini. Hal ini menyebabkan penyedia jasa asing yang menanamkan modalnya di Indonesia belum dapat membawa tenaga kerja dari negara asalnya ataupun negara lain kecuali tenaga kerja pada tingkat tertentu sehingga faktor ketersediaan tenaga kerja di negara tujuan menjadi penting. Selain itu, masuknya FDI sektor jasa telekomunikasi ke Indonesia signifikan mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Hal ini dapat menjadi jalan keluar bagi Indonesia dalam penciptaan lapangan kerja. Selain itu, hubungan Kausalitas Granger dua arah antara FDI dan TK juga menunjukkan salah satu dampak positif dari liberalisasi pasar jasa telekomunikasi dalam hal penyerapan tenaga kerja.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Realisasi masuknya FDI di sektor jasa telekomunikasi Indonesia periode 2000-2016 mengalami tren positif sebesar 4,6 persen. Berdasarkan provinsi, realisasi FDI sektor jasa telekomunikasi sebagian besar (80 persen) berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Penyerapan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di penyedia jasa telekomunikasi dengan modal FDI juga mengalami

tren positif sebesar 16,23 persen. Berdasarkan provinsi, penyerapan tenaga kerja juga terpusat di DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 85 persen. Untuk melihat dampak masuknya FDI terhadap tenaga kerja maka dilakukan pengujian menggunakan PVECM dengan tahapan-tahapan estimasi yaitu pengujian stasioneritas masing-masing variabel, pengujian kointegrasi, estimasi model PVECM dan pengujian Wald untuk menguji Kausalitas Granger jangka panjang, jangka pendek dan gabungan keduanya. Hasil pengujian stasioneritas menunjukkan bahwa kedua variabel stasioner pada ordo *first difference*. Adapun pengujian kointegrasi menghasilkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan kointegrasi atau hubungan jangka panjang.

Oleh karena hubungan kointegrasi belum menunjukkan arah hubungan dan kecepatan variabel untuk menuju keseimbangan jangka panjang maka dilakukan pengujian Wald. Hasil pengujian Wald menghasilkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan kausalitas jangka pendek dua arah pada taraf 10 persen dan kausalitas jangka panjang dua arah pada taraf 5 persen. Adapun koefisien ECT pada pengujian kausalitas Granger jangka panjang sebesar 89 persen untuk variabel terikat FDI dan 10 persen untuk variabel terikat TK. Hal ini berarti bahwa kecepatan perubahan FDI akibat perubahan TK untuk mencapai keseimbangan jangka panjang sebesar 89 persen per tahun. Sebaliknya, kecepatan perubahan TK akibat perubahan FDI untuk mencapai keseimbangan jangka panjang sebesar 10 persen per tahun. Adapun hubungan kausalitas Granger jangka panjang dua arah untuk kedua variabel adalah kuat.

Fokus kebijakan investasi Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BKPM, Bapak Thomas Lembong (Suara.com, 2017) adalah investasi yang menciptakan tenaga kerja dan investasi yang berorientasi ekspor. Dengan demikian, investasi asing secara langsung pada sektor jasa telekomunikasi yang masuk ke Indonesia signifikan mendorong dan mengoptimalkan lapangan kerja. Hal ini dapat menjadi bahan masukan dalam menjawab permasalahan negosiasi perdagangan jasa dalam hal peningkatan FEP menjadi 70 persen. Peningkatan FEP ini dapat mendorong masuknya FDI dan menciptakan lapangan kerja bagi Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Addison, T. A., & Heshmati, A. (2003). The new global determinants of FDI flow to developing countries. *World Institute for Development Economics Research*, DP No.2003/45, 1-31.
- Aizenman, J., & Ilan, N. (2006). FDI and trade two-way linkages? *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 46 (3), 317-337.
- Bekhet, A.H. and M.I. Mugableh. (2016). "Blueprinting the equilibrium relationships between inward FDI and employment in the Malaysian economic sectors: time series models approach". *Global Business and Economics Review*, Vol. 18 (2), 136-150. <https://doi.org/10.1504/GBER.2016.075507>.
- BKPM. (2017a). Data Realisasi FDI Sektor Jasa Telekomunikasi. Diunduh 2 Maret 2017 dari http://nswi.bkpm.go.id/wps/portal/biumum/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hDAwNPJydDRwN3UIMTA0f_EGOvYDcXYwMDQ_lwkA6zeAMcwNFA388jPzdVvY7rxwAkmxVPg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMTAwSUJCMUEwRzUINDBBTIQzSINGRDMwMDE!/.
- BKPM. (2017b). Data Tenaga Kerja Sektor Jasa Telekomunikasi. Diunduh 2 Maret 2017 dari http://nswi.bkpm.go.id/wps/portal/biumum/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hDAwNPJydDRwN3UIMTA0f_EGOvYDcXYwMDQ_lwkA6zeAMcwNFA388jPzdVvY7rxwAkmxVPg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMTAwSUJCMUEwRzUINDBBTIQzSINGRDMwMDE!/.
- CIAFactbook. (2016). *The World Factbook*. Diunduh 15 Desember 2017 dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>.
- Ekananda, M. (2016). *Analisis Ekonometrika Time Series*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Findlay, C. dan M. Pangestu. (2016). The Services Sector as a Driver of Change: Indonesia's Experience in The ASEAN Context. *Buletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 52 (1), 27-53.
- Gyasi. K.B. dan Y. Li. (2015). The Impact of Chinese FDI on Employment Generation in The Building and Construction Sector of Ghana. *Eurasian Journal of Social Sciences*, Vol. 3(2), 1-15. DOI: 10.15604/ejss.2015.03.02.001.
- Habib, M.D. dan S. Sarwar. (2013). Impact of Foreign Direct Investment on Employment Level in Pakistan: A Time Series Analysis. *Journal of Law, Policy and Globalization*. Vol. 10, 46-55.
- Ishido, H. (2012). "Liberalization of Trade in Services under ASEAN+n FTA: A Mapping Exercise". *Journal of East Asian Economic Integration*, Vol. 16, (2), 155-204.
- Jaumotte, M. F. (2004). *Foreign direct investment and regional trade agreements: The market size effect revisited*. International Monetary Fund. WP/04/206, 1-32.
- Khumalo, J. dan O. Mosoane. (2014). FDI - Employment Short-Run Dynamics in South Africa: VECM Approach. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol. 5 (20), 522-528, DOI: [10.5901/mjss.2014.v5n20p522](https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n20p522).
- MITI. (2016). ASEAN Member States Commitments under AFAS 9. Diunduh 10 Mei 2017 dari <http://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/3128?mid=378>.
- Pedroni, P. (1999). *Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors*. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, pp. 653-70.
- Said. F. B. dan H. B. O. Jamoussi. (2015). Direct and Spillover Effects of Regional FDI on Employment Opportunities in Tunisia: A Spatial Panel Data Approach. *International Journal of Economics*. Vol. 5 (5), 19-32, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2013.09.002>.
- Samimi. A. J.. S. Sadeghi and S. Sadeghi. (2013). *The Relationship between Foreign Direct Investment and Tourism Development: Evidence from Developing Countries*. Institutions and Economies Vol. 5 (2). 59-68.
- Shah, M. H. dan Y. Khan. (2016). Trade Liberalisation and FDI Inflows in Emerging Economies. *Business & Economic Review*. Vol. 8 (1), 35-52. DOI: 10.22547/BER/8.1.3.
- Suara.com. (2017). BKPM Jamin Masuknya Investasi Asing Ciptakan Lapangan Kerja. Diunduh 23 Agustus 2017 dari <http://www.suara.com/bisnis/2017/01/04/232518/bkpm-jamin-masuknya-investasi-asing-ciptakan-lapangan-kerja>.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 2014. Jakarta
- World Trade Organization (WTO). (2001). *Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments Under The General Agreement On Trade In Services (Document S/L/92)*. (Geneva: WTO Secretariat), 3-13.
- ASEAN Secretariat. (2014). *Annexes to the Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services*. Diunduh 24 Juli 2014 dari <http://www.asean.org/news/item/member-countries-horizontal-commitments-schedules-of-specific-commitments-and-the-list-of-most-favoured-nation-exemptions>.